

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketika mendalami pembahasan seputar lingkungan, pertimbangan yang dapat dipertanyakan adalah mengenai seberapa mampu bumi yang terbatas menampung kebutuhan manusia yang tidak terbatas? Berbagai aktivitas manusia mulai dari peperangan, industrialisasi, kapitalisme, globalisasi ekonomi, hingga aktivitas eksploitatif lainnya telah menciptakan kerusakan lingkungan hidup secara masif dan mendunia. Dengan setiap krisis yang terjadi, lantas siapa pemerintahan dunia yang berhak mengatur atas ranah lingkungan? Melalui pertimbangan inilah, istilah politik lingkungan global mulai menjadi topik hangat. Isu lingkungan pertama kali menjadi diskusi secara internasional mulai pada tahun 1960 hingga permulaan tahun 1970 yang mana ditandai dengan adanya Hari Bumi yang pertama kali diusung sebagai protes atas ketidakacuhan lingkungan pada tahun 1970. Diikuti dengan agenda politik lingkungan pertama yaitu *Human Environment Conference* atau yang dikenal sebagai *The Stockholm Declaration* (1972) oleh *United Nations General Assembly* (UNGA).¹

Konferensi tersebut menghasilkan perbincangan seputar pendefinisian pembangunan berkelanjutan, pembuatan *United Nations Environment Programme* (UNEP), hingga permulaan dari agenda lingkungan lainnya. Dalam Laporan Brundtland (1987) mengenai Komisi Global untuk Lingkungan dan Pembangunan, *United Nations* (UN) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan

¹ Peter Dauvergne, *Handbook of Global Environmental Politics*, 2nd ed. (Cornwall: Edward Elgar Publishing, 2012).

sebagai agenda untuk meraih “*our common future*” yang bertujuan mempertemukan kemampuan dunia dalam memenuhi dan menyeimbangkan kebutuhan seputar pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan sosial untuk masa kini dan masa depan.²

Menurut data yang disediakan *The World Counts* pada tahun 2023, tercatat bahwa setidaknya terdapat 55 miliar ton energi fosil, mineral, logam, dan biomassa yang telah diekstraksi manusia dari bumi setiap tahunnya.³ Dengan daya penggunaan dan populasi bumi yang terus meningkat, manusia pada faktanya terus menggunakan 50% lebih banyak sumber daya alam dibandingkan yang dapat disediakan oleh bumi.⁴ Aktivitas desktruktif manusia terus terjadi akibat sifat dasar manusia yang bersifat eksploitatif dan konsumtif.⁵ Padahal industrialisasi seharusnya menjadi sebuah pergerakan bagi manusia untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan dan perputaran perekonomian. Akan tetapi dengan kebutuhan atau *demand* yang terus meningkat, seolah alam harus menyediakan sumber daya 1.5 kali lipat bumi, sedangkan generasi akan terus berlanjut dan tidak ada manusia yang dapat menyediakan besaran bumi yang tidak terbatas tersebut.⁶

Berangkat dari urgensi tersebut, agenda global terhadap politik hijau semakin meluas dan memberi dampak pada sistematika perekonomian dunia. Saat memahami politik hijau, maka segalanya berangkat dari urgensi global

² Charles W. Kegley, *World Politics: Trend and Transformation*, 11th ed. (Belmont: Thomson Wadsworth, 2007).

³ The World Counts, “Environmental Degradation Facts,” *The World Counts*, 2014.

⁴ Pevehouse and Goldstein, *International Relations*, 404.

⁵ Dauvergne, *Op. Cit.*, p.48.

⁶ The World Counts, *Op. Cit.*

untuk memperbaiki beberapa masalah dasar mengenai: (1) Produksi dan konsumsi, (2) Keterbatasan sumber daya, (3) Populasi dan kemiskinan, (4) Kesehatan, dan (5) Kualitas hidup masyarakat dunia.⁷ Hingga kini manusia secara terus menerus memproduksi lebih banyak dan mengonsumsi lebih banyak. Dengan keterbatasan yang ada, ketika ekstraksi terhadap alam terus dilakukan maka hal ini akan menciptakan kelangkaan hingga perubahan iklim (*climate change*) secara masif akibat ekologi yang terganggu. Kelangkaan pada suatu kebutuhan menciptakan kenaikan harga pasar, sedangkan populasi bumi terus meningkat dari tahun ke tahun. Ditambah dengan segala ketidakstabilan lingkungan hidup yang menciptakan bencana alam dan wabah penyakit yang akan mempengaruhi kualitas hidup seisi bumi termasuk manusia dengan tingkat pemberdayaannya yang menurun, hingga menggiring pada penurunan daya ekonomi serta kemiskinan struktural.⁸

Setiap elemen ini saling berkaitan sehingga diskusi lingkungan tidak hanya terbatas mengenai politik hijau, melainkan juga mengenai bangkitnya ekonomi hijau dalam industri dan pasar global. Pada masa modern ini, kesadaran masyarakat global sebagai konsumen telah berkebang secara signifikan. Hal ini ditandai dengan perubahan pola pembangunan *branding* atau citra perusahaan menuju penerapan ekonomi hijau yang ramah atas lingkungan.⁹ Upaya terhadap klaim ramah lingkungan maka berkaitan pula dengan penggunaan sumber daya,

⁷ Jon C. W. Pevehouse and Joshua S. Goldstein, *International Relations*, 12th ed. (New Jersey: Pearson, 2020).

⁸ Pevehouse and Goldstein, *International Relations*, 408.

⁹ Kevin Wehr, *Green Culture: An a to Z Guide* (Los Angeles: Sage Publications, 2011).

material, metode pengelolaan, sistematika pengemasan, distribusi, pemasaran, hingga berkelanjutan eksistensi produk dalam pertimbangan jangka panjang.

Dalam dinamika ekonomi hijau pada dekade terakhir, terdapat beragam *demand* yang disuarakan oleh segenap masyarakat global, organisasi internasional antar-pemerintah, serta non-pemerintah. Beberapa diantaranya terdapat perbincangan hangat masyarakat global mengenai urgensi *slow fashion*, *free-range*, *cruelty-free products*, *organic resources*, *single-use plastic ban*, *solar electricity*, *eco-friendly vehicles*, *carbon footprint reduction*, *green infrastructures*, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dan berbagai isu ekonomi hijau lainnya yang berkembang pesat sepanjang abad ke-20.¹⁰ Dalam *Global Consumer Insights Survey* (2019), ditemukan data berikut ini:

“35% responden lebih memilih pembelian terhadap produk ramah lingkungan, 37% mencari produk dengan kemasan ramah lingkungan, dan 41% responden menghindari penggunaan plastik sebisa mungkin. Survei tersebut menemukan bahwa 81% orang yang disurvei mengharapkan perusahaan sadar lingkungan dalam iklan dan komunikasi mereka, dan 69% responden mengatakan bahwa mereka melakukan segala yang mungkin untuk meminimalkan jejak karbon mereka (mengalami kenaikan dari 63% setahun sebelumnya).¹¹”

Ketertarikan masyarakat terhadap produk hijau telah menarik perhatian perusahaan untuk membangun bisnis yang dilandaskan pengolahan ramah lingkungan, yang mana isu ekonomi hijau tengah berlangsung dalam skala internasional terhadap berbagai perusahaan mancanegara dan multinasional. Metode pemasaran yang menggarisbawahi isu ramah lingkungan menjadi salah

¹⁰ Pevehouse and Goldstein, *International Relations*, 385.

¹¹ Amy Emmert, “The Rise of the Eco-Friendly Consumer,” *Strategy Business*, July 8, 2021, <https://www.strategy-business.com/article/The-rise-of-the-eco-friendly-consumer>.

satu daya tarik perusahaan di mata konsumen, yang mana *green marketing* menjadi salah satu upaya pembangunan *branding* perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen (*green trust*) yang menggiring pada kesetiaan konsumen terhadap keputusan pembelian suatu jasa atau produk perusahaan tersebut.¹²

Sepanjang tahun 2006-2009, *green advertising* telah mengalami peningkatan sebesar 300%, dengan terpantau 60 perusahaan global menggunakan sosial media untuk menekankan *branding* berkelanjutan, dan pada tahun 2012 terpantau mengalami peningkatan hingga 176 perusahaan global menekankan kinerja dan kebijakan ramah lingkungan miliknya. Pada tahun 2009, *green sales* secara lingkup global telah mencapai \$230 miliar USD secara penjualan global, dan meningkat pesat pada tahun 2015 hingga mencapai \$845 miliar USD.¹³ Adanya peningkatan pesat atas perusahaan yang melakukan klaim ramah lingkungan, tentunya turut memiliki kesenjangan antara realitas dan klaim yang ditekankan oleh perusahaan-perusahaan terkait. Inilah yang menjadi fenomena *greenwashing* sebagai kritik terhadap perusahaan bahwa apakah metode ramah lingkungan tersebut sungguh-sungguh diaplikasikan, atau justru hanya pembangunan citra semata.¹⁴

Fenomena *greenwashing* telah menjadi problematika global yang terjadi pada berbagai negara sebagai *underground issues* yang tidak marak diungkap menuju permukaan. Bagi pelaku ekonomi, implementasi ekonomi hijau sejatinya

¹² Wehr, Op. Cit.

¹³ Thomas P. Lyon and A. Wren Montgomery, "The Means and End of Greenwash," *Organization & Environment* 28, no. 2 (March 23, 2015): 223–49, <https://doi.org/10.1177/1086026615575332>.

¹⁴ Wehr, Op. Cit.

tidak selalu mengundang keuntungan yang memadai, sedangkan kebutuhan terhadap pemeliharaan lingkungan tetap dibutuhkan. Kompleksitas yang terjadi dari sudut pandang politik-ekonomi mengundang perdebatan yang melibatkan pemerintahan, perusahaan, dan aktivis lingkungan hingga dalam skala organisasi internasional antar pemerintahan ataupun non-pemerintahan. Sepanjang abad ke-20, negara-negara berpengaruh seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Australia, dan berbagai negara lainnya berusaha untuk berkomitmen terhadap pemulihan lingkungan hidup secara global. Dorongan tersebut termasuk datang melalui agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disahkan oleh UN untuk meraih target pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.¹⁵ Mulai diterapkan sebagai *entry into force* yakni masuk ke dalam hukum yang mengikat pada tahun 2016, dengan salah satu butir agendanya yaitu *Sustainable Production and Consumption* (SCP) pada SDG ke-12 yang mana berkaitan erat dengan fenomena *greenwashing*.

Sebagai fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor global, *greenwashing* tentu merupakan isu vital yang dapat dialami melalui perspektif hubungan internasional. Apalagi dalam agenda menangani *greenwashing*, maka perputaran ekonomi akan berhadapan secara langsung dengan berbagai kebijakan yang akan diberlakukan. Dalam sudut pandang hubungan internasional, segala interaksi ini membuat pergerakan politik kepentingan tersendiri bagi masing-masing pihak terkait. Salah satunya berkenaan pula terhadap interaksi antara negara maju dengan negara yang berkekuatan relatif lebih lemah secara

¹⁵ Pevehouse and Goldstein, *International Relations*, 385.

ekonomi dan pengaruh. Negara maju bergerak sebagai pemilik modal, pelaku ekstraksi sumber daya, pemegang kekuatan yang mempengaruhi berbagai aspek kesepakatan dagang, maupun sebagai teladan.¹⁶ Sedangkan pada posisi dengan kekuatan yang relatif lebih lemah, negara berkembang, maupun *upper-middle income state* menerima perilaku eksploitasi, keharusan untuk mengikuti kebijakan, ataupun kebutuhan untuk bernegosiasi agar dapat menyesuaikan pasar yang ada.

Dalam progresi kebijakan hijau, *European Union* (EU) yakni Uni Eropa salah satunya termasuk sebagai organisasi supranasional yang bersikap tanggap dalam menerapkan regulasi untuk meresponi fenomena *greenwashing*. Sebagaimana Uni Eropa memiliki arus padat terhadap investasi, perdagangan, produksi, konsumsi, pengembangan riset, dan berbagai perihal terkait industrialisasi¹⁷ — lantas Uni Eropa turut berperan sebagai kekuatan ekonomi global (*global power economy*) yang berpengaruh bagi berbagai negara lainnya yang menekan kerja sama terhadap negara anggotanya.

¹⁶ Kegley, *Op. Cit.*, p.366.

¹⁷ Silva, *Op. Cit.*

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan analisis terhadap dinamika ekonomi hijau antara agenda politik dan realita lapangan, maka penelitian ini akan berfokus pada pengenalan isu *greenwashing* melalui perspektif hubungan internasional yang mana dapat didalami melalui studi kasus Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi global yang berkontribusi secara progresif terhadap arus politik dan ekonomi hijau. Berdasarkan pendalaman yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini memiliki perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan fenomena *greenwashing* dalam dinamika ekonomi hijau?
2. Bagaimana strategi Uni Eropa dalam berkontribusi merespons fenomena *greenwashing* dapat mempengaruhi arah pembangunan ekonomi hijau secara global?

1.3 Tujuan Penelitian

Fokus pembahasan utama dalam penelitian ini berada pada pendalaman isu mengenai fenomena *greenwashing* beserta berbagai kasus dan kebijakan yang diupayakan untuk menangani problematika tersebut secara global. Secara merinci maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, menghadirkan pengenalan mendalam terhadap isu *greenwashing* terkait pola fenomena, dilematika yang dihadapi, serta implikasi yang menghambat dinamika pembangunan ekonomi hijau. Dengan memahami berbagai perspektif terkait, penulis dapat menyajikan penelitian ini sebagai bentuk identifikasi bahwa

fenomena *greenwashing* telah menjadi bagian dari realita dinamika ekonomi hijau yang turut membutuhkan perhatian lebih bagi para regulator dan bidang hubungan internasional.

Kedua, penulis hendak mendalami penindakan dan aspek legalitas serta interaksi para pelaku ekonomi, yang mana berkaitan kebijakan serta peran pemerintahan, perusahaan multinasional, organisasi internasional, serta konsumen global. Ketiga, penulis mendalami studi kasus terhadap Uni Eropa dengan berbagai strateginya atas kebijakan pro-lingkungan hidup dan penanganan fenomena *greenwashing*. Sebagai organisasi antar-pemerintah dengan kekuatan ekonomi global yang berpengaruh, penulis menggunakan Uni Eropa untuk dapat menjelaskan perilaku atau interaksi negara maju dengan negara berkembang atau *upper-middle income state* pada dinamika politik-ekonomi hijau dalam meresponi fenomena *greenwashing*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui pembahasan tersebut, penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pembaca untuk lebih mengedukasi diri dalam memantau transparansi serta mengolah informasi terhadap citra produk ekonomi hijau. Pembaca dapat memahami berbagai ragam kegiatan *greenwashing*, mengenali isu secara lebih menyeluruh, serta menghindari indikasi praktik *greenwashing* agar dapat menggiring perbincangan sosial politik ataupun perekonomian internasional menjadi lebih solutif terhadap lingkungan hidup.

Bagi studi hubungan internasional, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan perhatian mendalam terhadap realisasi upaya pembangunan ekonomi hijau yang semakin optimal. Sekiranya penelitian ini dapat memicu para penggiat Hubungan Internasional untuk melakukan pemantauan serta penindakan lebih jauh terhadap penanganan *greenwashing* yang efisien dan solutif bagi lingkungan, dan para pelaku ekonomi.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan — Penulis memberikan pengantar mengenai permulaan dari urgensi lingkungan serta perubahan model perekonomian menuju ramah terhadap bumi dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan diberikan secara ringkas terkait pola konsumsi yang mengarah pada ramah lingkungan, namun menjadi penyebab munculnya klaim hijau yang menyesatkan yaitu fenomena *greenwashing*. Setelah menerakan latar belakang, penulis menjelaskan mengenai perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian sebagai bentuk pengenalan isu secara mendalam.

Bab II: Kerangka Berpikir — Penulis menguraikan tinjauan pustaka sebagai referensi penelitian sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dalam mengembangkan penelitian. Bab II disertai dengan landasan teori yang digunakan penulis yaitu neoliberalisme institusionalisme serta konsep yang terkandung dalam penelitian ini seturut teori tersebut. Setiap pembahasan dalam bab ini kemudian mendasari pola pemikiran penulis dalam memandang isu.

Bab III: Metodologi — Penulis menerangkan tentang metodologi yang digunakan yaitu pendekatan penelitian secara kualitatif, metode penelitian studi kasus, proses pengumpulan data melalui sekunder juga primer, serta proses analisis data yang diolah dengan naratif.

Bab IV: Analisis — Penulis menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu dengan menjelaskan mengenai *greenwashing* sebagai fenomena global yang berpengaruh dalam dinamika ekonomi hijau. Pembahasan mengenai *greenwashing* dibagi menuju paradigma, studi kasus, dan kelemahan kebijakan ekonomi hijau. Lalu ditutup dengan analisis penulis mengenai Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi global yang memiliki serangkaian kebijakan terkait *greenwashing* serta berpengaruh sangat kuat terhadap dinamika ekonomi hijau kedepannya.

Bab V: Analisis — Penulis menyimpulkan setiap pembahasan dalam penelitian ini, disertai dengan penemuan penelitian, rangkuman argumentasi penulis, dan saran terhadap penelitian yang dapat dilaksanakan kembali kedepannya.